

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tata kelola pemerintahan dan pembenahan di daerah, sangat penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah agar anggaran belanja dan belanja daerah dapat dikelola secara sederhana, efektif, tepat guna, dan mencapai tujuan yang diharapkan (direncanakan). Hal ini sesuai dengan amanat peraturan di bidang keuangan negara yang berimplikasi pada perlunya alat pengendalian ekonomi negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sila ini paling sederhana dapat dilakukan jika semua kegiatan di suatu instansi otoritas pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga tugas, tercapai secara tertib, terkendali, berdaya dan hijau. Jadi kami menginginkan perangkat yang dapat menawarkan jaminan yang cukup baik bahwa pelaksanaan kegiatan di perusahaan otoritas pusat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efektif, file manajemen ekonomi kerajaan yang andal, aset negara yang nyaman, dan menginspirasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sistem ini disebut sistem manipulasi batin yang dalam perangkat lunaknya jangan lupa menikmati kesetaraan dan kepatutan dan mengingat ukuran, kompleksitas, dan sifat kewajiban dan kemampuan organisasi kepresidenan.

Sesuai dengan amanat lengkap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Kewajiban Perekonomian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan (LK) dengan tujuan penawaran untuk memastikan ketersediaan LK yang cukup. tulus dalam segala hal, sesuai dengan persyaratan akuntansi umum

di Indonesia atau dasar akuntansi yang komprehensif selain persyaratan akuntansi baru di Indonesia.

Pemeriksaan ekonomi yang diselesaikan menggunakan BPK adalah pemeriksaan laporan keuangan berharga otoritas (LKPP) dan catatan keuangan otoritas terdekat (LKPD), selain beberapa organisasi dan BUMN. pemeriksaan Laporan keuangan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi moneter yang dimuat dalam Laporan keuangan. persyaratan untuk memberikan ulasan yang sesuai dengan berbagai peraturan 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal enam belas ayat (1), kritik adalah pernyataan ahli pemeriksa tentang ekuitas statistik keuangan yang disajikan dalam laporan ekonomi, terutama terutama didasarkan pada kebutuhan (a) kesesuaian dengan persyaratan otoritas akuntansi, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap petunjuk dan tip kriminal, dan (d) efektivitas perangkat manipulasi internal (SPI).

Pemeriksaan Laporan Perekonomian yang dilakukan melalui BPK berpedoman pada penggunaan Persyaratan Pemeriksaan Ekonomi Amerika Serikat (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan BPK nomor satu tahun 2007. Berdasarkan SPKN secara lengkap, sampai saat ini dikatakan bahwa Pemeriksaan dokumen hasil akhir (LHP) Laporan moneter harus mengungkapkan bahwa Pemeriksa telah melakukan uji kepatuhan terhadap ketentuan rekomendasi dan aturan hukum yang berdampak pada penyajian LK. Selain itu, mengenai pelaporan manipulasi, SPKN menetapkan bahwa pengamatan manipulasi kecerdasan harus menunjukkan kelemahan dalam topik pelaporan keuangan yang dapat dianggap sebagai "situasi yang dapat dilaporkan".

Kemampuan penyimpangan atau korupsi bisa jadi tidak wajar mengingat alokasi anggaran bantuan sosial yang besar. Korupsi dana bantuan sosial telah muncul sebagai penyakit mematikan seperti kekacauan karena telah menyebar ke berbagai daerah. Dari aspek regulasi, angka Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi mengungkap ketentuan yang mengatur keadilan dalam pengelolaan anggaran bansos. Dalam elemen kontrol, banyak kendala ditempatkan dalam perangkat penganggaran, distribusi, proyek, dan pengawasan. Bantuan sosial moneter sangat penting digunakan untuk menghiasi kesejahteraan masyarakat dan korporasi, terutama masyarakat yang menginginkannya. tetapi, kami sering mendapatkan waktu di mana kisaran harga digunakan oleh orang atau lembaga yang kuat untuk keuntungan non-publik mereka. Modus yang sering muncul adalah memberikan bantuan tanpa software, menawarkan bantuan melebihi alokasi, menahan bantuan, memberikan bantuan tanpa kewajiban untuk mengajukan, dan proposal atau bantuan fiktif.

UPT Baksos Bakti Sosial Peduli Balita (PSAB) Jawa Timur, Sidoarjo. itu diposisikan di jl. Monginsidi No. 25 Sidoarjo, sesuai dengan undang-undang Gubernur No. 119 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendirikan UPT PSAB yang berfungsi sebagai unsur transit untuk teknik adopsi atau sebagai tempat berlindung bagi balita yang ingin penguasaan dan kepentingan tertentu dengan bantuan pemanfaatan bagi bayi terlantar yang ditampung di UPT ini. Berdasarkan statistic dan informasi, jenis bayi yang diperoleh pemberian di UPT Psos Balita Sidoarjo selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018 terjadi penurunan dari tahun 2014 menjadi 40 anak sampai tahun 2018 menjadi 25 anak. Tercatat jumlah balita yang memperoleh pelayanan di UPT Panti Sosial Balita Sidoarjo selama lima tahun pada tahun 2015 berjumlah

196 balita. kuantitas minimum. bayi terlantar yang terlantar membuat penutupan bayi terlantar dari Provinsi Jawa Timur masih sangat banyak, sedangkan di Provinsi Jawa Timur yang terbaik adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang fokus pada penanganan terlantar. bayi ditempatkan di Kabupaten Sidoarjo. menangani bayi terlantar yang ditampung dari seluruh daerah di Jawa Timur dengan kemampuan terbanyak lima puluh bayi.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN SOSIAL (STUDI PADA UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR”**

1.2. Rumusan Masalah

Terutama berdasarkan latar belakang yang didefinisikan di atas, masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan anggaran bansos pada UPT Jaminan Sosial dan Pemeliharaan Anak Balita pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal dalam pengendalian ekonomi anggaran bansos pada UPT perlindungan dan pengasuhan sosial balita pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagian besar didasarkan pada masalah yang ditentukan, kemampuan dan penggunaan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan bansos pada UPT perlindungan sosial dan penanggulangan anak balita, Badan Usaha Sosial Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen internal dalam manipulasi keuangan kisaran harga bantuan sosial pada UPT perlindungan sosial dan penanganan anak balita, badan usaha sosial Provinsi Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Aspek Akademis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang peningkatan pengelolaan keuangan bansos dan pengelolaan internal lembaga.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan informasi serta wawasan tentang sistem akuntansi pendapatan tunai dan pengendalian internal dalam menggunakan dan memberikan alasan di balik ide yang telah diperoleh di perguruan tinggi.

3. Aspek praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi tentang pentingnya pengendalian keuangan dana bantuan sosial dan pengendalian internal, khususnya dalam pendapatan tunai karena dapat langsung terkait dengan uang perusahaan.